ABSTRAK

Perdagangan manusia sudah ada di Thailand sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Isu perdagangan manusia semakin berkembang di Thailand pada tahun 2015-2017. Perdagangan manusia menjadi masalah serius bagi Thailand berdasarkan laporan Trafficking Victime Protection Act yang membuat Thailand masuk pada posisi darurat. Berbagai upaya Thailand dalam menangani perdagangan manusia di rasa belum cukup maksimal. Pemerintah Thailand kemudian mengeluarkan kebijakan 5P yang terdiri dari policy, prosecution, protection, prevention dan partnership sebagai kebijakan utama pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kosnep Human Security menurut UNDP dengan mengambil salah satu aspek yaitu Personal Security.

Kata Kunci: Thailand, Perdagangan manusia, kebijakan 5P, Human Security, Personal Security

ABSTRACT

Trafficking in persons has been in Thailand since the 1970s to the present. The issue of trafficking in persons is growing in Thailand in 2015-2017. Trafficking in persons has become a serious problem for Thailand based on a report on the Law on Protection of Trafficking in Persons which made Thailand enter into an emergency position. Thailand's various efforts to deal with trafficking in persons have not been maximized. The Thai government then issued a 5P policy consisting of policy, prosecution, protection, prevention and partnership as Thailand's main policies in the matter of trafficking in persons. In this study the author uses the concept of Human Security according to UNDP by taking one aspect, namely Personal Security.

Keyword: Thailand, Trafficking in Persons, 5P Policy, Human Security, Personal Secuity